



Brief Pilkada Riau 2024 —

KOMITMEN EKOLOGIS CAGUB- CAWAGUB RIAU:

**HANYA
FORMALITAS,
TAK ADA AKSI
NYATA**



Komitmen Ekologis Cagub-Cawagub Riau: Hanya Formalitas, Tak Ada Aksi Nyata

I. Pendahuluan

Catatan Jikalahari, persoalan ekologis masih terus berlangsung tiap tahunnya. Dalam kurun waktu 6 tahun saja, terdapat lebih dari 22 korban jiwa meninggal disebabkan banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga serangan harimau. Belum lagi persoalan kemiskinan akibat pengelolaan lingkungan yang tidak berpihak pada masyarakat. Sayangnya, pemimpin di Riau tidak pernah serius menyikapi persoalan-persoalan yang saban tahun selalu muncul.

Dimulai dari persoalan karhutla, dalam 6 tahun terakhir, Sipongi KLHK mencatat lebih dari 137 ribu ha hutan dan lahan di Riau telah hangus terbakar bahkan menelan 3 korban jiwa pada 2019. Berdasarkan analisis hotspot Jikalahari, 32% karhutla terjadi di areal konsesi HTI dan perkebunan sawit. Setiap tahunnya, pemerintah Riau hanya menetapkan status siaga darurat karhutla dan mengandalkan bantuan dari pusat untuk memadamkan api. Pada 2024 saja, status siaga darurat karhutla ditetapkan sejak Maret – November 2024. Hanya Kuantan Singingi yang tidak menetapkan status siaga darurat karhutla.

Lain halnya dengan persoalan banjir. Banjir besar melanda Riau di awal 2024. BPBD Riau merilis 233.477 warga Riau menjadi korban terdampak dan lebih dari 61 ribu unit rumah terkena dampak banjir yang terjadi di Riau¹. Bahkan banjir di Pekanbaru dan Rokan Hilir menelan korban jiwa, 2 warga meninggal terseret arus banjir² pada 2024 dan 4 warga meninggal pada 2019.

Persoalan lingkungan lainnya adalah adanya 13 korban jiwa yang tewas akibat serangan harimau yang kehilangan habitatnya akibat ekspansi perusahaan HTI dan sawit. Teranyar, pada 4 September lalu warga Sungai Apit di terkam harimau saat istirahat pasca bekerja di kebun. Konflik tak berkesudahan antara harimau dan manusia ini juga dampak dari hilangnya habitat satwa endemik tersebut. Melihat hal ini, pemerintah Riau juga sama sekali tidak mengeluarkan kebijakan apa pun untuk menyelesaikan persoalan ini, bahkan tidak menunjukkan simpati terhadap para korban.

Persoalan krusial dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan adalah ketidakadilan akses dan hak masyarakat, khususnya masyarakat adat dan tempatan. Data BPS³, jumlah masyarakat miskin di Riau pada 2024 mencapai 492,25 ribu jiwa dan justru tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di kabupaten/kota yang didominasi oleh aktivitas HTI dan sawit seperti Rohul, Kampar, Rohil, Pelalawan dan Kep Meranti⁴.

Ketimpangan penguasaan kawasan hutan antara korporasi dan masyarakat sangat jauh, menurut data analisis Jikalahari, dari total 8,7 juta ha luas Riau, sekitar 3,75 juta ha telah diberikan kepada korporasi HTI dan perkebunan sawit⁵. Hanya 1,2 juta ha yang diperuntukkan bagi masyarakat melalui skema perhutanan sosial, namun hingga kini realisasinya baru 14,2% dan anggaran yang tersedia hanya 1% dari anggaran di OPD yang membidangnya. Sejatinya, peluang untuk mengurangi ketimpangan ini adalah dengan memanfaatkan kebijakan perhutanan sosial semaksimal mungkin.

¹ <https://riaupos.jawapos.com/riau/2254081433/update-banjir-riau-data-warga-terdampak-di-12-kabupaten-dan-kota>

² <https://news.detik.com/berita/d-7119436/2-orang-tewas-akibat-banjir-di-riau>

³ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTq1Izl=jumlah-penduduk-miskin--ribu-jiwa--menurut-provinsi-dan-daerah.html>

⁴ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjE5Izl=jumlah-penduduk-miskin--ribu-jiwa--menurut-kabupaten-kota-.html>

⁵ Data HTI berdasarkan Data PBPH KLHK, akses WebGIS 2022 dan data Perkebunan sawit Riau 2017

Persoalan lainnya, Riau masih berada di zona merah korupsi. Perkara – perkara korupsi, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam masih belum jelas titik terangnya. Sudah 16 tahun berlalu, namun masih belum ada upaya menjerat 20 korporasi terlibat kasus suap perizinan yang melibatkan Gubri Rusli Zainal, Bupati Siak Arwin AS, Bupati Pelalawan T Azmun Jaafar dan 4 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

Begitu pula kasus suap alih fungsi lahan yang dilakukan pengusaha sawit Surya Darmadi kepada Annas Maamun untuk mengeluarkan sawitnya dari kawasan hutan. Kasus lainnya, korupsi perpanjangan perizinan Hak Guna Usaha PT Adimulia Agrolestari kepada Bupati Kuansing Andi Putra. Ini menunjukkan bahwa sektor perizinan SDA rentan akan suap yang pada akhirnya berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan.

Di tengah mirisnya warga Riau yang dihujani berbagai persoalan ekologis yang terjadi, **akankah pilgub menjadi titik balik penting mengentaskan persoalan ekologis ini?**

Untuk itu, Jikalahari membedah visi misi 3 pasangan calon yang berlaga untuk menyelesaikan persoalan ekologis yang terjadi.

II. Rekam Jejak dan Visi Misi Ekologis 3 Pasangan Calon Gubri - Wagubri

Dalam pilkada kali ini, ada 3 pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang berlaga meraup suara masyarakat Riau pada 27 November mendatang. Siapa saja paslon ini? Jikalahari merangkum profil dan visi, misi serta program andalan mereka berkaitan dengan isu ekologis. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut:

1. Paslon Nomor Urut 1: Abdul Wahid dan SF Hariyanto

Abdul Wahid dan SF Hariyanto maju dalam pilkada kali ini diusung oleh 3 partai yaitu PKB, PDI Perjuangan dan Nasdem. Berikut profil dari paslon Gubri – Wagubri beserta visi misinya:

a. Abdul Wahid

Profil

- Lahir di Belaras, Inhil pada 21 November 1980
- Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa
- Terpilih menjadi anggota DPR RI Periode 2019 – 2024 Dapil Riau II dengan 55.770 suara
- Anggota Komisi VII membidangi energi, riset dan teknologi
- Anggota DPRD Provinsi Riau 2009 – 2019
- Direktur PT Malay Nusantara Cipta 2002 – 2023

Rekam jejak berkaitan dengan isu ekologis dan anti korupsi

- Menyetujui pengesahan RUU Minerba menjadi UU sesuai prosedur yang berlaku dengan catatan.
- Bersikap dalam rapat harmonisasi RUU Provinsi Riau terkait menghargai kekhasan Riau dan ajukan UU bagi hasil sawit diatur dalam UU khusus
- Bersikap dalam pembahasan RUU energi baru dan terbarukan terkait optimalisasi batu bara sehingga Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, namun harus dapat mengendalikan pasar

- Menyuarakan terkait cadangan migas terutama di Blok Rokan agar dapat dikembangkan bersama untuk kemandirian energi dan bahas terkait peralihan kelola wilayah kerja Rokan, Riau akan mendapatkan manfaat apa.
- Menyuarakan terkait pengawasan lapangan terhadap lubang tambang besar, salah satunya di Riau untuk segera disikapi⁶.

b. SF Hariyanto

Profil

- Lahir di Pekanbaru, 30 April 1965
- Sekretaris Daerah Provinsi Riau 2021 – 2024
- Pj Gubernur Riau 29 Februari 2024 – 14 Agustus 2024
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2010 – 2014
- Staf Ahli Gubernur Bidang Infrastruktur Provinsi Riau 2014 – 2015
- Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2015 – 2016
- Inspektur II di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR di Jakarta pada 2018, Inspektur V tahun 2019, Inspektur VI tahun 2020. Serta Staf Inspektorat VI di Kementerian PUPR tahun 2021.

Rekam jejak berkaitan dengan isu ekologis dan anti korupsi

- Pada Mei 2023 dipanggil KPK untuk klarifikasi kaitan LHKPN akibat aksi pameran gaya hidup mewah yang dilakukan istrinya dan menjelaskan bahwa barang mewah yang digunakan adalah barang palsu serta tiket liburan mewah adalah promo.

Paslon Abdul Wahid dan SF Hariyanto dengan slogan Bersama Membangun Riau Abdul Wahid – SF Hariyanti (Bermarwah) mengusung visi yang disertai 7 misi dan 6 program prioritas. Dari misi dan program prioritas yang mereka usung, Jikalahari memilah dan menganalisis hanya yang berkaitan dengan persoalan ekologis dan anti korupsi di Riau. Untuk rincian dari program kerja yang berkaitan dengan lingkungan, akan didedah di bagian selanjutnya terkait analisis visi misi berdasarkan parameter Jikalahari.

Visi: Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju

Misi terkait lingkungan ada di nomor 2: Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.

2. Paslon Nomor Urut 2 M Nasir dan Muhammad Wardan

M Nasir dan Muhammad Wardan maju dalam pilkada kali ini diusung oleh koalisi Kim Plus yang terdiri dari partai Gerindra, Gelora, PAN, Demokrat, PSI, Perindo dan PPP. Berikut profil dari paslon Gubri – Wagubri berserta visi misinya:

⁶ Rekam jejak ini diperoleh dari dokumentasi selama menjabat di DPR RI diakses di <https://wikidpr.org/anggota/867>

a. M Nasir

Profil

- Lahir pada 23 Juli 1973 di Pematang Siantar, Sumatera Utara
- Pengusaha dan politikus dari Partai Demokrat sejak 2004
- Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat (2004-2009)
- Ketua Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di DPP Partai Demokrat (2009-2012)
- Anggota DPR RI tiga periode (2009-2024) mewakili Dapil Riau II
- Komisi VII dalam bidang energi, riset, teknologi dan lingkungan hidup
- Komisaris PT Anak Negeri, PT Mahkota Negara dan PT Anugerah Nusantara. Ketiga perusahaan ini diduga terlibat dalam praktik suap pemenangan proyek-proyek di berbagai kementerian⁷.

Rekam jejak berkaitan dengan isu ekologis dan anti korupsi

- Pada 2020 ia pernah meminta CSR kepada Dirut Pertamina untuk dapil wilayahnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)⁸
- Nasir meminta regulasi teguran atau pencabutan terkait pemanfaatan limbah oleh perusahaan minyak yang berada di dapilnya.
- Nasir tidak setuju dengan program pengembangan PLT Nuklir.
- Nasir mengatakan KLHK perlu memberi sanksi kepada penambang yang merusak lingkungan atau perusahaan harus memberi kepastian atau deposit untuk menjaga kelestarian lingkungan.
- Nasir mengusulkan dibentuk Pansus atau Panja untuk membedah perusahaan tambang yang tidak memelihara limbahnya.
- Tanggapan Nasir dalam AMDAL & Pengelolaan Limbah B3, Merkuri dalam Penambangan (2018). Nasir menemukan perusahaan yang tidak mengelola limbahnya di Kepulauan Riau. Ia berpendapat ada baiknya perusahaan tersebut dicabut izinnya, karena sanksi administrasi tanpa adanya standarisasi pembuangan limbah dapat merusak lingkungan hidup. Ia juga menambahkan agar mengecek pemda-pemda yang mengeluarkan izin.
- Tanggapan Nasir dalam Rencana Strategis Kementerian LHK (2016), meminta data perusahaan besar yang mengeluarkan limbah, tetapi tidak dikelola dengan baik untuk dipanggil⁹.

b. Muhammad Wardan

Profil

- Lahir pada 2 Januari 1961 di Pasar Kembang, Indragiri Hilir
- Politikus Partai Gerindra
- Asisten III Setda Kabupaten Indragiri Hilir (2004-2005)
- Bupati Indragiri Hilir dua periode (2013-2023)

Rekam jejak berkaitan dengan isu ekologis dan anti korupsi

- Mempopulerkan Kabupaten Indragiri Hilir dengan istilah Negeri Hampanan Kelapa Dunia
- Membangun sektor perkebunan kelapa dalam menekan angka inflasi daerah
- Program infrastruktur Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi atau DMIJ Plus berhasil lebih dari 75 persen infrastruktur telah berdiri di setiap pelosok desa.

⁷ <https://icw.or.id/id/article/nazar-dan-nasir-diperiksa-kasus-plts>

⁸ <https://www.goriaru.com/berita/baca/rapat-dengan-pertamina-anggota-dpr-dapil-riau-ini-minta-jatah-csr-secara-terbuka.html>

⁹ <https://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef81d>

- Wardan belum bisa menyelesaikan konflik lahan masyarakat Desa Mumpa yang diratakan PT Sumatera Riang Lestari (SRL) hingga saat ini.
- Pada 2023, Wardan pimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Inhil bersama Forkopimda.
- Wardan menerima aspirasi masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Rakyat Pungkat Bersatu (ORPB). ORPB meminta Pemkab Inhil untuk mencabut izin PT SAL. Wardan menanggapi akan panggil pihak perusahaan dan membuat surat menghentikan aktivitas perusahaan sementara.

Pasangan Nasir dan Wardan Bersatu (Nawaitu) juga memiliki visi yang disertai dengan 6 misi serta 7 program super prioritas beserta program kerja di pemilihan kepala daerah Provinsi Riau Tahun 2024. Untuk rincian dari program kerja yang berkaitan dengan lingkungan, akan didedah di bagian selanjutnya terkait analisis visi misi berdasarkan parameter Jikalahari.

Visi: Riau Berdaya Saing, Berintegritas, Maju dan Berbudaya Melayu, Menuju Riau Emas

Misi:

1. Meningkatkan produksi, produktivitas serta tata niaga pertanian, hilirisasi SDA, pengembangan industri, Koperasi dan UMKM, serta penguatan ekonomi kerakyatan. **(Misi ke-2)**
2. Pemerataan pembangunan kewilayahan dan mempercepat penguatan infrastruktur, yang berbasis kepada potensi, pelestarian lingkungan dan konektivitas antar daerah. **(Misi ke-3)**
3. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesionalisme, berintegritas, kreatif, inovatif dan memperkuat meritokrasi serta transformasi digital. **(Misi ke-5)**

3. Syamsuar dan Mawardi Muhammad Saleh

Syamsuar dan Mawardi maju dalam pilkada kali ini diusung oleh koalisi petahana berupa partai Golkar dan PKS. Berikut profil dari paslon Gubri – Wagubri berserta visi misinya:

a. Syamsuar

Profil

- Kelahiran 8 Juni 1954 di Desa Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir 8 Juni 1954.
- Gubernur Provinsi Riau periode 2019 – 2024
- Wakil Bupati Siak periode 2001 - 2006
- Bupati Siak periode 2011 – 2019

Rekam jejak berkaitan dengan isu ekologis dan anti korupsi

Bupati Siak 2011 – 2019

- Menerbitkan Perbup Siak Kabupaten Hijau
- Penerima penghargaan atas upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut di sepanjang tahun 2015 lalu dari Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo pada 1 Maret 2016¹⁰.

¹⁰ <https://www.halloriau.com/read-siak-78124-2016-03-01-bupati-siak-terima-penghargaan-penanggulangan-karhutla-dari-mendagri.html>

- Pada 2018 Syamsuar bersama *Chairman* Asia Pulp and Paper (APP) Sinar Mas Jepang Tan Ui Sian menanam 10 ribu batang pohon meranti di kawasan Distrik Tapung Giam Siak Kecil, Kabupaten Siak¹¹.

Gubernur Riau 2019 - 2024

- Menerbitkan Perda No 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Karhutla.
- Membentuk Satgas Illegal berdasarkan SK Gubri Nomor Kpts.1078/IX/2019 pada Agustus 2019.
- Menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Penanggulangan Karhutla terkait menyegel perusahaan yang terbakar pada 16 September 2019.
- Menerbitkan Keputusan Gubri Nomor Kpts.659/III/2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Riau Tahun 2019.
- Menerbitkan Pergub Nomor 20 pada 8 Mei 2019 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Atau Pekerjaan di Provinsi Riau pada 2 Mei 2019.
- Menerbitkan keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.911/VIII/2019 tentang Tim Terpadu Penertiban Penggunaan Kawasan/Lahan Secara Ilegal di Provinsi Riau pada 2 Agustus 2019
- Membentuk Tim Restorasi Gambut dan Rehabilitasi mangrove Daerah (TRGMD) Provinsi Riau melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor 871/VII/2021.
- Menerbitkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Riau Hijau
- Realisasi perhutanan sosial (PS) masih lamban, hingga 13 September 2023 hanya seluas 160.944,34 ha.
- Belum menerbitkan satu pun Pergub turunan Perda No 10 tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya serta Perda No 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengusulkan areal potensi PS untuk masyarakat menjadi perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) melalui BUMD Provinsi
- Tidak menyelesaikan revisi Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau
- Berhubungan baik dengan perusahaan perusak lingkungan dan hutan dengan menerbangkan balon banner APP dan APRIL di halaman kantor Gubernur Riau setiap HUT Riau¹²

b. Mawardi Muhammad Saleh

Profil

- Kelahiran 24 Juni 1969 di Bangkinang, Kampar
- Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau 2022
- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru 2022 - 2025
- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kampar 2023 – 2028.
- Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riau

Rekam jejak berkaitan dengan isu ekologis dan anti korupsi

- Menempuh jenjang S1 di Universitas Madinah tahun 1990 dan berhasil meraih prestasi tertinggi predikat summa cum laude. Tahun 2000 menyelesaikan Pendidikan S2 nya
- Masuk dalam orang Indonesia kelima yang meraih gelar doktor bidang fiqh di Universitas Madinah pada tahun 2004.

¹¹ <https://mediacenter.riau.go.id/read/43044/tanam-10-ribu-pohon-meranti-syamsuar-minta-ap.html>

¹² <https://jikalahari.or.id/kabar/rilis/hut-riau-ke-67-tahun/>

Visi

Kandidat pasangan dengan nomor urut 3 pada pilkada serentak 2024 ini yang kerap disingkat dengan Suwai ini mengusung Visi *Terwujudnya Riau Maju dan Bermartabat Sebagai Pusat Ekonomi Sumatera dan Gerbang Utama Ekonomi Asean Tahun 2029*.

Kata “Maju” sendiri dalam visi Suwai memiliki enam makna:

1. Pemenuhan Infrastruktur dan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas;
2. Ketersediaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta penguasaan terhadap IPTEK;
3. Pengelolaan SDA yang lestari;
4. Keseimbangan Pembangunan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan (Riau Hijau);
5. Ekonomi berkelanjutan yang produktif dan inklusif;
6. Terwujudnya Masyarakat Riau yang Makmur dan Sejahtera.

Sedangkan kata “Bermartabat” memiliki 3 makna:

1. pengamalan nilai – nilai beragama;
2. penerapan falsafah budaya melayu dalam sendi kehidupan bermartabat;
3. pelestarian terhadap budaya nasional yang beragam di daerah.

Misi

Dalam dokumen visi-misi Syamsuar dan Mawardi mejabarkan 8 misi. Beberapa poin misi yang diusung membahas isu kaitan dengan ekologis dan korupsi di antaranya **misi ketiga: Memperkuat perekonomian daerah dan memperluas kesempatan kewirausahaan dan kesempatan kerja. Misi ini salah satu arahan kebijakan prioritasnya adalah hilirisasi sumber daya alam (SDA)**. Selain itu, isu ekologis juga dimuat dalam **misi ke tujuh**, yaitu: *meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup yang bersih, indah dan sehat*. **misi ke-8: menyelenggarakan birokrasi dan pelayanan public yang mudah, cepat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)**. Untuk rincian dari program kerja yang berkaitan dengan lingkungan, akan didedah di bagian selanjutnya terkait analisis visi misi berdasarkan parameter Jikalahari.

Dari misi berkaitan dengan isu ekologis yang diusung oleh ketiga kandidat ini, muncul pertanyaan, cukupkah gagasan-gagasan yang diusung ini untuk menyelesaikan persoalan ekologis yang terjadi di Riau dalam 5 tahun ke depan?

III. Analisis Visi Misi Paslon Gubri – Wagubri Berdasarkan 6 Parameter Jikalahari

Jikalahari menganalisis visi, misi dan program kerja yang dicanangkan para kandidat khusus berkaitan dengan isu ekologis. Tujuannya untuk melihat, apakah narasi yang dibangun oleh para kandidat memang cukup menjawab persoalan di Riau, atau hanya janji-janji di atas kertas yang minim aksi nyata.

Dalam melakukan analisis, Jikalahari menyangdingkan narasi dalam dokumen visi misi para kandidat dengan fakta-fakta persoalan ekologis yang terjadi di Riau dalam 6 tahun terakhir. Dalam analisis ini, Jikalahari hendak melihat komitmen dari para kandidat didasarkan pada 6 parameter.

1. Perlindungan dan pemulihan ruang ekologis Riau.

Ini berkaitan dengan komitmen terhadap perlindungan dan pemulihan ruang ekologis para kandidat untuk pencegahan dan penanganan karhutla, banjir, perlindungan ekosistem gambut, perlindungan terhadap perusakan hutan, perambahan kawasan hutan, perlindungan terhadap habitat satwa dan

hal lainnya berkaitan dengan SDA Riau, termasuk penyediaan pendanaan untuk pemulihan lingkungan.

Ruang ekologis Riau dalam 6 tahun terakhir dihadapkan pada persoalan-persoalan yang 'itu-itu' lagi, namun tanpa ada penyelesaian. Seperti karhutla dalam 6 tahun terakhir telah menghancurkan 137 ribu ha hutan dan lahan di Riau. Pada 2019, karhutla menyebabkan 3 orang meninggal, lebih 300 ribu orang terpapar penyakit ISPA, tidak hanya itu, negara juga mengalami kerugian sekitar Rp 50 triliun.

Jikalahari melakukan analisis hotspot yang terjadi di Riau sepanjang 2019 hingga Oktober 2024 menggunakan data dari satelit Terra Aqua Modis dengan confidence > 70% (diartikan, titik yang muncul besar kemungkinan merupakan titik api). **Selama 6 tahun tersebut, terdapat 5.597 titik berpotensi titik api, dan 32% di antaranya berada dalam areal konsesi HTI dan perkebunan sawit serta 78% hotspot tersebut berada di kawasan gambut Riau.** Jikalahari juga menemukan, hotspot selama 6 tahun terakhir ini terbanyak muncul di Inhil, Pelalawan dan Bengkalis.

Jikalahari juga melakukan pemantauan tutupan hutan tersisa di Riau sejak 2019 hingga 2023 melalui citra satelit Sentinel-2. Dari hasil analisis, ditemukan sepanjang 5 tahun, **Riau telah kehilangan tutupan hutannya seluas 64.785 ha, dimana 29% luasan deforestasi tersebut berada dalam kawasan konsesi HTI, HPH dan perkebunan sawit.** Jikalahari menemukan, tutupan hutan Riau pada 2019 seluas 1.442.669 ha, kini telah berkurang dan tersisa hanya 1.377.884 ha. Berdasarkan kabupaten, deforestasi terluas dalam kurun waktu 5 tahun ini terjadi di Kampar, Pelalawan dan Rohul.

Tak hanya soal karhutla dan deforestasi, BPBD Riau catat ada 233.477 jiwa jadi korban terdampak banjir dari akhir Desember 2023 hingga awal Januari 2024. Terdata 61.789 Kepala Keluarga (KK) terdampak banjir dan korban terbanyak masyarakat Kuansing 47.720 KK. Akibat banjir ini, lebih dari 61.717 unit rumah rusak ringan hingga rusak berat. Bahkan banjir di Pekanbaru dan Rohil pada 2024 ini sebabkan 2 warga meninggal terseret arus banjir¹³ dan 4 warga meninggal pada 2019.

Persoalan lainnya adalah serangan harimau terhadap warga yang berada di areal jelajahnya. Harimau yang telah kehilangan rumahnya akibat ekspansi perusahaan HTI dan sawit, menyerang warga yang melintas ataupun beraktifitas di sekitar habitatnya. Jikalahari mendata sejak 2018 hingga 2024, tercatat sudah ada 14 kejadian serangan harimau dan menelan korban tewas hingga 13 orang.

Tabel 01. Data korban dan lokasi konflik harimau - manusia terjadi di Riau sejak 2018 – 2024

No	Korban	Desa	Kec	Kab	Tahun	Ket
1	Jumiati	Tanjung Simpang	Pelangiran	Inhil	2018	Tewas
2	M Amri	Tanjung Simpang	Pelangiran	Inhil	2019	Tewas
3	Wahyu Kurniadi	Tanjung Simpang	Pelangiran	Inhil	2019	Tewas
4	Darmawan	Tanjung Simpang	Pelangiran	Inhil	2020	Tewas
5	MS	Teluk Kabung	Gaung	Inhil	2021	Tewas
6	Tugiat	Simpang Gaung	Gaung	Inhil	2022	Tewas
7	Indra	Tasik Tebing Serai	Talang Mandau	Bengkalis	2022	Tewas
8	Indra	Tanjung Simpang	Pelangiran	Inhil	2022	Tewas
9	Sopiana Damanik	Serapung	Kuala Kampar	Pelalawan	2022	Tewas

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-7119436/2-orang-tewas-akibat-banjir-di-riau>

10	Acai	Teluk Lanus	Sungai Apit	Siak	2022	Tewas
11	Andi Sukerman	Desa Tumang	Siak	Siak	2023	Tewas
12	Rahmad	Tanjung Simpang	Pelangiran	Inhil	2024	Tewas
13	Yasonia Zega	Penyengat	Sungai Apit	Siak	2024	Tewas
14	Jonheri	Mengkapan	Sungai Apit	Siak	2024	Luka luka

Di tengah persoalan-persoalan ekologis yang telah dipaparkan, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah mempercepat pemulihan lingkungan akibat karhutla ataupun deforestasi, demi mengatasi banjir yang terjadi akibat rusaknya kondisi tanah dan hilangnya hutan sebagai penyerap cadangan air. Tak hanya itu, upaya berani pemerintah untuk melakukan review perizinan perusahaan, baik yang menyebabkan karhutla, tidak menjaga arealnya dengan baik sehingga terjadi perambahan, ataupun areal konsesinya yang berada dalam habitat satwa di lindungi, adalah terobosan yang paling di nanti.

Selain itu, dalih akan sulitnya melakukan perlindungan maupun pemulihan lingkungan akibat keterbatasan dana juga menjadi perhatian Jikalahari dalam pilkada kali ini. Adanya anggaran berbasis lingkungan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk percepatan baik pencegahan maupun penanggulangan kerusakan lingkungan hidup akan menjadi nilai positif. Sebab, dengan adanya perencanaan anggaran, maka membuktikan adanya upaya konkrit dalam realisasi perlindungan dan pemulihan ruang ekologis Riau yang telah rusak.

2. Memberantas korupsi SDA.

Komitmen para kandidat dalam mengedepankan reformasi birokrasi yang bersih dan keberanian untuk mendorong penegakan hukum terhadap kasus-kasus berkaitan dengan korupsi, terutama kasus korupsi SDA serta transparansi dalam proses kampanye baik terkait sumber pendanaan dan penggunaannya menjadi perhatian penting.

Riau telah mencetak rekor dimana 3 gubernurnya telah menjadi terpidana kasus korupsi berturut-turut. Saleh Djasit terlibat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan telah merugikan negara Rp 4,7 miliar. Rusli Zainal terlibat kasus korupsi PON dan perizinan kehutanan terhadap 20 korporasi HTI dan telah merugikan negara mencapai Rp 265 miliar. Terakhir, Annas Maamun, terlibat korupsi alih fungsi kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Kuansing, Bengkalis dan Rohil.

Tak hanya itu, berdasarkan penilaian integritas yang dilakukan KPK, Riau masih berada dalam zona merah yang berarti menjadi daerah dengan tingkat korupsi yang tinggi. Perkara – perkara korupsi, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam masih belum jelas titik terangnya. Sudah 16 tahun berlalu, namun masih belum ada upaya menjerat 20 korporasi terlibat kasus suap perizinan yang melibatkan Gubri Rusli Zainal, Bupati Siak Arwin AS, Bupati Pelalawan T Azmun Jaafar dan 4 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

Begitu pula kasus suap alih fungsi lahan yang dilakukan pengusaha sawit Surya Darmadi kepada Annas Maamun untuk mengeluarkan sawitnya dari kawasan hutan, hingga saat ini belum ada upaya dari pemerintah untuk mendorong penegakan hukum terhadap korporasi yang menyuap para pejabat Riau ini. Kasus lainnya, korupsi perpanjangan perizinan Hak Guna Usaha PT Adimulia Agrolestari kepada Bupati Kuansing Andi Putra. Ini menunjukkan bahwa sektor perizinan SDA rentan akan suap yang pada akhirnya berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan.

Melihat rentannya para pejabat dapat terlibat kasus korupsi berkaitan dengan SDA, mulai dari perizinan hingga pemanfaatan ruang, tentunya komitmen konkrit dan keberanian dari paslon Gubri-Wagubri sangat dinanti-nantikan.

3. Memaksimalkan partisipasi publik dalam penyusunan hingga pelaksanaan kebijakan.

Komitmen para kandidat untuk melibatkan publik yang partisipatif dalam segala proses pemerintahannya tentu menunjukkan bahwa segala kebijakan yang diambil memang seutuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pelibatan publik ini tentunya diharapkan mulai dari tahap penyusunan sebuah kebijakan hingga implementasinya. Pelibatan publik menjadi salah satu tolok ukur bahwa pemimpin tersebut mendengarkan aspirasi dari masyarakatnya.

4. Penegakan hukum kasus SDA Riau

Keberanian dari para kandidat untuk mendorong penegakan hukum yang seadil-adilnya bagi masyarakat yang menjadi korban akibat praktik buruk perusahaan dalam mengelola usahanya yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berimbas pada masyarakat, adalah terobosan yang paling dinanti.

Bahkan jika kandidat berani dengan tegas memproses hukum Perusahaan yang memperoleh perizinan dengan cara yang tidak benar. Keberanian para kandidat untuk menghukum para taipan ataupun korporasi yang terlibat kejahatan berupa korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak hingga pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan kehutanan sangat menjadi poin penting untuk menghentikan persoalan ekologis di Riau.

5. Memperjuangkan hak masyarakat adat atas hutan tanah dan mengatasi konflik sosial

Persoalan mendasar dari konflik yang sering terjadi antara masyarakat adat dan tempatan dengan perusahaan yang ada di Riau sebab hak-hak mereka atas hutan tanah yang mereka peroleh secara turun temurun tidak diakui oleh pemerintah. Walau sudah dijamin berdasarkan putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, dan diteruskan dalam peraturan daerah hingga kebijakan gubernur. Aksi nyata terhadap pengakuan hak-hak masyarakat adat ini sangat dinantikan dari para kandidat yang berlaga menjadi Riau 1.

Menilik pada kebijakan sebelumnya, bahkan pada 22 Mei 2018 telah terbit Peraturan Daerah (Perda) nomor 14 tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk implementasi Perda ini, setidaknya ada tiga Pergub pelaksana dari Perda yang harus disiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi (DLHK) Riau. Namun hingga saat ini, baru sebatas penerbitan Pergub tanpa ada realisasi nyata.

Padahal pengakuan masyarakat adat adalah landasan paling mendasar agar masyarakat adat dapat memperjuangkan hak-hak mereka ini masih belum terlihat hilalnya menjadi perhatian dari pemimpin Riau. Untuk itu, komitmen terhadap isu ini dari para kandidat akan menjadi tolok ukur, apakah masyarakat adat, yang menjadi akar dari budaya melayu Riau memang benar menjadi prioritas mereka atau tidak.

6. Memperluas ruang kelola hutan untuk masyarakat termasuk mencabut izin perusahaan dan mengembalikannya pada masyarakat

Parameter terakhir adalah hal krusial yang akan memperlihatkan keberpihakan para kandidat terhadap masyarakat. Dominasi penguasaan hutan dan lahan yang saat ini mencapai 60% oleh korporasi dan cukong, baik secara legal maupun ilegal membuat masyarakat telah kehilangan ruang mengelola hutan. Melalui skema PS untuk memberikan ruang bagi masyarakat mengelola hutan, Jikalahari akan meninjau, apakah ini menjadi perhatian dari para kandidat.

Riau khususnya, telah mendapat alokasi 1.183.397 ha yang pengelolaannya dapat diajukan menjadi hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan pola kemitraan. Tambahan lainnya berupa pengakuan perlindungan kerja sama kehutanan (Kulin KK), yaitu skema pengelolaan hutan kerja sama antara masyarakat dengan Perhutani, baik di hutan produksi maupun hutan lindung.

Berdasarkan data KLHK hingga 13 September 2023, capaian persetujuan perhutanan sosial di Riau seluas 160.944,34 ha atas 142 unit SK. PS yang disetujui ini terbagi dalam 5 skema dan berdampak terhadap lebih dari 30 ribu KK. Dari 12 kabupaten/kota di Riau, lokasi PS terluas berada di Kampar, Kepulauan Meranti dan Rokan Hulu. Berikut rincian dari capaian persetujuan PS Riau.

Tabel 08. Data capaian persetujuan PS Riau per 13 September 2023

No	Skema	Unit SK	Luas (Ha)	Jumlah KK
1	Hutan Desa	38	78.097,79	13.885
2	Hutan Kemasyarakatan	85	51.220,01	9.880
3	Hutan Tanaman Rakyat	10	5.669,54	495
4	Hutan Adat	3	19.113	5.246
5	Kulin KK	6	6.844	586
Jumlah		142	160.994,34	30.092

Hingga Oktober 2024, Jikalahari belum mendapatkan informasi rinci kaitan realisasi PS pada 2024. Beberapa media menyebutkan realisasi PS hingga Juli 2024 telah mencapai 162 ribu ha, namun tidak ada penjelasan rinci terkait informasi tersebut. Jikalahari menelusuri website GoKUPS¹⁴ di url <https://gokups.menlhk.go.id/public/achievements> selaku sumber informasi terkait perhutanan sosial yang terupdate.

Dari website ini, Jikalahari menemukan, usulan PS di Riau yang telah disetujui mencapai 168.177,3 ha dengan jumlah unit SK sebanyak 158, bertambah 16 SK dalam rentang waktu hampir 1 tahun, dan jumlah KK terdampak mencapai 30.495 KK. Menilik luasan usulan PS yang telah disetujui per provinsi, dari 37 provinsi di Indonesia, Riau menempati posisi ke 17. Diposisi teratas, Kalbar dengan luas usulan 818,7 ribu ha, Papua Selatan 762,6 ribu ha, Kaltara 522,4 ribu ha, Kalteng 480,7 ribu ha dan Papua Barat 424,5 ribu ha.

Dengan rendahnya realisasi PS di Riau yang baru 14,2%, menunjukkan bagaimana minimnya perhatian dari pemerintah terhadap akses bagi masyarakat untuk peroleh hak kelola atas hutan demi meningkatkan kesejahteraan mereka. Padahal alokasi wilayah PS sangat luas di Riau dan ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi salah satu langkah pelestarian kawasan hutan dan sejalan dengan meningkatkan perekonomian masyarakat.

¹⁴ Diakses pada 16 Oktober 2024 pukul 11.30 WIB

Parameter	Komitmen dan Program Wahid – SF Hariyanto	Komitmen dan Program Nasir - Wardan	Komitmen dan Program Syamsuar - Mawardi
<p>Perlindungan dan pemulihan ruang ekologis Riau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong ketahanan energi serta pemanfaatan energi berkelanjutan Pembangunan TPST Regional untuk pengelolaan limbah yang berkelanjutan Dukungan penyelesaian banjir kabupaten/kota Peningkatan penyediaan air bersih Peningkatan infrastruktur wilayah pesisir dan sentra-sentra produksi Hilirisasi produk pada sektor-sektor unggulan Penguatan dan pengembangan kawasan industri di Provinsi Riau Peningkatan ketahanan pangan daerah Reorientasi pembangunan sektor-sektor perekonomian, pertanian, perdagangan, wisata, industri dan sektor strategis lainnya. Fasilitasi dan dukungan penyelesaian persoalan sampah, banjir dan air bersih Bantuan keuangan desa untuk memperkuat infrastruktur, SDM dan ekonomi kerakyatan Penguatan BUMD khususnya di sektor migas, pangan, keuangan dan sektor strategis lainnya untuk kemakmuran masyarakat <p>Dari banyaknya rencana program yang dicanangkan, keseluruhan poin-poin yang ada tidak dapat menjawab</p>	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen menghasilkan daya saing Riau dalam swasembada pangan, energi, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Modernisasi pertanian dan implementasi teknologi <i>smart farming</i> ramah lingkungan dan ekonomis Penguatan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah Komitmen membangun konektivitas antar daerah sehingga menjamin aksesibilitas seluruh sektor dengan selalu memperhatikan pelestarian lingkungan Penguatan ekosistem dan lanskap hijau Peningkatan perluasan cakupan sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi pada kawasan perkotaan. Penguatan tata kelola pengelolaan hutan lindung dan ekosistem alami Kebijakan konservasi energi ke pemanfaatan energi yang ramah lingkungan Pembangunan ketenagalistrikan yang bersumberkan EBT sesuai potensi daerah Mewujudkan alokasi anggaran untuk Provinsi Riau dari Pemerintah Pusat atas pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Riau 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui kerja sama dengan berbagai pihak baik dengan Masyarakat, dunia usaha dan aparat penegak hukum Pembangunan Water Front City di Kota Pekanbaru Pembangunan pengelolaan sampah terpadu Restorasi gambut dan rehabilitasi hutan mangrove, hutan dan alam Meningkatkan jumlah sekolah adiwiyata Pelatihan dan pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk pelatihan kewirausahaan bidang hasil hutan non kayu Pengembangan kampung iklim/kampung hijau Restorasi gambut dan rehabilitasi hutan mangrove, hutan dan alam. <p>Jika dilihat dari narasi – narasi yang tercantum dalam visi – misinya, ada upaya untuk melakukan perlindungan dan pemulihan ruang ekologis. Namun, jika dicermati, narasi ini masih terlihat normatif dan belum bisa menggambarkan solusi persoalan ekologis di Riau. Apalagi Syamsuar selaku petahana seharusnya memiliki basis kuat dan rencana yang lebih terperinci menyelesaikan persoalan-persoalan ekologis yang sudah ia hadapi selama menjabat pada periode sebelumnya.</p>

	<p>persoala ekologis yang terjadi di Riau. Hilirisasi hingga pembangunan yang digadang-gadangkan memuat sistem berkelanjutan, juga tak tampak eksistensinya seperti apa.</p>	<p>Program yang dicanangkan oleh Nasir-Wardan masih perlu penjelasan konkrit karena narasi memperhatikan pelestarian lingkungan, ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan perlu perencanaan sistematis.</p>	
<p>Memberantas korupsi SDA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas <p>Komitmen yang disampaikan pasangan ini hanya normatif penguatan integritas. Ketegasan dalam memberantas perilaku koruptif dalam kebijakan ataupun membangun transparansi pemerintahan hingga perizinan tidak termuat dalam komitmen paslon ini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Provinsi Riau, menuju penyelenggaraan pemerintah yang profesional dan bebas korupsi. <p>Komitmen ini masih normatif dan belum ada penjelasan aksi nyata yang akan diambil. Ketegasan dalam memberantas perilaku koruptif dalam kebijakan ataupun membangun transparansi pemerintahan hingga perizinan tidak termuat dalam komitmen paslon ini.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin pelayanan public yang mudah, cepat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan cara memberi kemudahan pelayanan perizinan dan investasi berusaha, dan mewujudkan nilai – nilai dasar ASN “BerAKHLAK” <p>Narasi masih normatif dan terlihat formalitas. Suwai tidak berani memfokuskan dan menjuru ke persoalan korupsi ekologis.</p>
<p>Memaksimalkan partisipasi publik dalam penyusunan hingga pelaksanaan kebijakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kerja sama daerah Pekansikawan, Siap Bedelau dan kerja sama strategis lainnya • Fasilitasi dan dukungan kenyamanan serta kemudahan berinvestasi • Pembangunan smart province, pengembangan public private partnership dan kerjasama antar daerah <p>Komitmen paslon ini berkaitan dengan partisipasi hanya normatif kerjasama antar daerah dan lebih ke arah kebijakan yang merujuk pada pemerintahan saja. Tidak terlihat peluang keterlibatan publik dan terlihat lebih mengutamakan kenyamanan dan kemudahan investasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kolaborasi pemerintah dan pihak swasta dalam kebijakan pembangunan termasuk penurunan pengangguran dan kemiskinan <p>Komitmen yang dibangun untuk pelibatan publik belum tampak. Narasi yang dimuat adalah adanya kolaborasi bersama sektor swasta.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pelatihan kelompok sadar wisata, desa wisata & pelaku ekonomi kreatif. 2. Pemberdayaan Riau Creative Hub sebagai komunitas & para generasi muda dalam pengembangan 17 sub sektor ekonomi kreatif. 3. Pelatihan dan pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk pelatihan kewirausahaan bidang hasil hutan non kayu <p>Narasi Suwai masih normatif, belum menyentuh pokok persoalan, hanya melibatkan masyarakat dalam implementasinya saja, semestinya melibatkan masyarakat dimulai dari proses perencanaan hingga proses penyusunan konsep.</p>

	yang tak jelas manfaatnya apakah akan melibatkan publik atau tidak.		
Penegakan hukum kasus SDA Riau	Tidak ada komitmen mengarah ke parameter ini	Tidak ada komitmen mengarah ke parameter ini	<p>1. Menjalin kerjasama dengan BPKP, BPK dan KPK untuk pendampingan menyediakan sistem pengaduan Masyarakat.</p> <p>Narasi Suwai hanya sebatas kerjasama untuk pendampingan, Suwai tidak tegas untuk mengatakan bekerjasama untuk menegakkan hukum kasus SDA di Riau.</p>
Memperjuangkan hak masyarakat adat atas hutan tanah dan mengatasi konflik sosial	Tidak ada komitmen mengarah ke parameter ini	<p>1. Pengembangan pusat kebudayaan melayu</p> <p>2. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada pancasila</p> <p>Program Nasir-Wardan untuk menjadikan Riau Emas berbudaya melayu hanyalah khayalan ketika entitas asli budaya melayu, yaitu Masyarakat Hukum Adat Melayu yang ada di Riau justru hak-haknya tidak diakui dan dilindungi. Mustahil berbicara Riau emas ketika masyarakat adatnya tercerabut dari hutan tanah yang menjadi 'nyawa' mereka.</p>	<p>1. Perlindungan dan pelestarian budaya Melayu melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan objek pemantauan kebudayaan.</p> <p>2. Impementasi budaya Melayu melalui kurikulum pendidikan.</p> <p>Narasi Suwai hanya bicara hilir dari budaya melayu berupa implementasi nilai-nilai kasat mata. Namun secara konkrit, perlindungan dan pelestarian dari budaya melayu harus dimulai dari akarnya, yaitu masyarakat adat melayu itu sendiri yang menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya melayu di Riau. Tak ada perhatian konkrit dari Syamsuar selaku petahana terhadap Masyarakat Adat Riau.</p>
Memperluas ruang kelola hutan untuk masyarakat termasuk mencabut izin perusahaan dan mengembalikannya pada masyarakat	Tidak ada komitmen mengarah ke parameter ini	Tidak ada komitmen mengarah ke parameter ini	<p>1. Memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan membangun taman tematik dan hutan kota termasuk Pembangunan untuk jogging track</p> <p>Narasi belum menyentuh persoalan dasar. Riau mempunyai 12 kabupaten/kota yang masyarakatnya membutuhkan ruang untuk hidup. Narasi ini diperuntukkan hanya dalam kota. Lalu bagaimana dengan daerah?</p>

Dari 6 parameter yang Jikalahari buat untuk melihat kesiapan dan keseriusan para paslon untuk memperbaiki ruang ekologis Riau, tidak ada satupun paslon yang memenuhinya. Komitmen yang dibangun hanya bersifat normatif dan tidak menjawab akar permasalahan. Baik dari pemulihan ruang ekologis, komitmen melawan rasuah, pelibatan masyarakat, perluasan ruang kelola masyarakat, bahkan yang lebih miris, saat mengusung Riau yang berbudaya melayu, justru paslon tidak menempatkan ruang pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Dengan visi misi hingga program kerja yang disusun oleh para paslon, persoalan ekologis seperti karhutla, banjir, konflik satwa, konflik ruang kelola masyarakat hingga perilaku koruptif berkaitan dengan SDA akan terus menjadi ancaman berat dalam 5 tahun ke depan.

Untuk itu, Jikalahari menilai, perlu adanya penggalian lebih dalam serta penjelasan lebih konkrit baik dari KPU hingga para paslon selama kampanye dan debat pilgub nantinya. Sehingga masyarakat dapat memilih dengan jelas siapa kandidat yang memang akan bertungkus lumus membuat Riau menjadi lebih baik. Tiap paslon punya PR besar untuk menyusun lebih rinci rencana dan program-program yang benar-benar dapat menjadi solusi bagi persoalan ekologis di Riau

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Para paslon sudah seharusnya mengedepankan isu ekologis dalam rencana kerjanya selama 5 tahun ke depan. Karena penyelesaian persoalan ekologis Riau tidak dapat disesuaikan dengan *mood* pemimpin Riau. Ia harus dirancang dengan matang dengan memperhatikan segala situasi dan kondisi. Namun dari hasil analisis Jikalahari terhadap visi misi dan program kerja para paslon, ditemukan bahwa:

1. Visi Misi dan program kerja para paslon belum menjawab akar persoalan ekologis Riau dan tidak mengarah pada penyelesaian persoalan yang ada
2. Pasangan Abdul Wahid – SF Hariyanto lebih mengutamakan hilirisasi SDA dan pembangunan industri dan kerja sama antar daerah. Walaupun memuat kata pembangunan berkelanjutan, namun esensi berkelanjutannya belum terlihat dalam rencana yang mereka susun.
3. Pasangan Nasir – Wardan sebagian kecil program kerjanya memuat beberapa catatan penting dalam parameter, namun masih perlu penjelasan lebih rinci arah program kerja seperti penguatan tata kelola pengelolaan hutan lindung dan ekosistem alami serta anggaran berbasis SDA
4. Pasangan Syamsuar – Mawardi selaku petahana tidak menjadikan rekam jejak terdahulu sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih baik. Syamsuar masih membunyikan program-programnya terdahulu yang masih minim realisasi.
5. Tidak ada paslon yang berani dengan tegas untuk mendorong penegakan hukum terhadap kejahatan SDA, berkomitmen memperluas ruang kelola bagi masyarakat, bahkan tidak ada satupun yang menyentuh perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Rekomendasi

Jikalahari merekomendasikan kepada KPU untuk

1. Memasukkan isu SDA-LH dalam debat paslon Gubri – Wagubri terutama berkaitan dengan:
 - a. **Perlindungan dan pemulihan ruang ekologis Riau.**
 - b. **Memberantas korupsi SDA.**
 - c. **Memaksimalkan partisipasi publik dalam penyusunan hingga pelaksanaan kebijakan**
 - d. **Penegakan hukum kasus SDA Riau**
 - e. **Memperjuangkan hak masyarakat adat atas hutan tanah dan mengatasi konflik sosial**

- f. Memperluas ruang kelola hutan untuk masyarakat termasuk mencabut izin perusahaan dan mengembalikannya pada masyarakat**
2. KPU membuka dana kampanye dari masing-masing paslon kepada publik yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan atau badan usaha non pemerintah sepanjang masa kampanye dalam upaya transparansi dan pencegahan adanya politik kepentingan
3. KPU, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) bekerja sama untuk menelusuri dan melacak sumbangan dana kampanye terutama berasal dari pihak asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya dan hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana.

Jikalahari merekomendasikan kepada para calon

1. Berkomitmen untuk menyusun lebih rinci kerja-kerja berkaitan dengan:
 - a. Perlindungan dan pemulihan ruang ekologis Riau.**
 - b. Memberantas korupsi SDA.**
 - c. Memaksimalkan partisipasi publik dalam penyusunan hingga pelaksanaan kebijakan**
 - d. Penegakan hukum kasus SDA Riau**
 - e. Memperjuangkan hak masyarakat adat atas hutan tanah dan mengatasi konflik sosial**
 - f. Memperluas ruang kelola hutan untuk masyarakat termasuk mencabut izin perusahaan dan mengembalikannya pada masyarakat**demi perbaikan ruang ekologis Riau ke depannya.
2. Bersedia membuka dana kampanye dan tidak menerima sumbangan dana kampanye dari perusahaan yang memiliki rekam jejak buruk terhadap perusakan lingkungan hidup dan kehutanan di Riau.